

Efektivitas dan Tantangan Kegiatan Reses DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sepaku

Indah Widuri ^{1*}, Ahmad Firman Hakim ²

¹⁻² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

* indahwiduri14@gmail.com

Abstrak

Kegiatan reses merupakan instrumen krusial bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi konstituen, terutama di wilayah transisi seperti Kecamatan Sepaku yang kini menjadi pusat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan reses dalam mendorong kesejahteraan ekonomi lokal melalui analisis situasi dan profil mitra di Desa Argomulyo. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif pada kegiatan reses dan wawancara mendalam. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa reses telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat seperti infrastruktur jalan usaha tani, pelatihan UMKM, dan sekolah lapangan pertanian. Namun, efektivitasnya terhambat oleh kendala administratif berupa ketidaklengkapan proposal teknis warga dan keterbatasan anggaran daerah yang terfokus pada megaprojek nasional. Kesimpulannya, pendampingan intensif bagi mitra dalam penyusunan usulan program sangat diperlukan agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dalam ekosistem ekonomi IKN.

Kata Kunci: Reses DPRD, kesejahteraan ekonomi, Sepaku, Ibu Kota Nusantara, aspirasi masyarakat

Pendahuluan

Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara kini tengah mengalami transformasi struktural yang sangat masif sejak ditetapkan sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Transformasi ini membawa dampak ganda yang signifikan; di satu sisi menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi regional yang mencapai 23,96 persen pada triwulan I-2025, namun di sisi lain memicu inflasi lokal yang memberatkan daya beli warga asli (Diba dkk., 2025). Pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar didorong oleh sektor konstruksi megaprojek, sehingga muncul risiko paradoks di mana warga lokal justru menghadapi kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan tradisional mereka. Dalam dinamika ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui kegiatan reses menjadi instrumen politik yang sangat vital sebagai jembatan aspirasi agar masyarakat Sepaku tidak terpinggirkan oleh arus pembangunan nasional yang bergerak sangat cepat (Gazali dkk., 2025).

Secara teoretis dan yuridis, reses merupakan masa di mana anggota dewan bekerja di luar gedung parlemen untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya guna menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat (Samosir & Tukiman, 2024). Di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya Kecamatan Sepaku, kegiatan reses memiliki fungsi strategis sebagai kanal akuntabilitas moral dan politis anggota legislatif untuk memastikan kebutuhan rakyat masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Efektivitas reses tidak hanya diukur dari frekuensi kunjungan, melainkan dari sejauh mana usulan warga dapat bertransformasi menjadi program pembangunan nyata yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wafi dkk., 2025). Tanpa pengawalan yang kuat dari lembaga legislatif, mekanisme perencanaan pembangunan berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik warga terdampak transisi IKN.

Hadirnya IKN menuntut adanya transformasi ekonomi bagi penduduk asli yang selama ini bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Proses transisi dari pola hidup rural menuju masyarakat kota pintar (*smart city*) menciptakan tekanan bagi warga lokal untuk bersaing dengan arus tenaga kerja pendatang yang memiliki keterampilan lebih unggul (Sutanto, 2022). Terdapat kekhawatiran nyata mengenai marjinalisasi masyarakat adat dan penduduk asli akibat kenaikan nilai lahan serta perubahan orientasi ekonomi yang memaksa warga beralih profesi (Nurrachman, 2024). Analisis situasi di lapangan menunjukkan bahwa warga memerlukan kebijakan afirmatif yang menjamin inklusivitas, memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tetap menghormati sumber penghidupan lokal dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan nyata (Supriyanti dkk., 2023).

Masyarakat Sepaku, sebagai mitra utama dalam pengabdian ini, menaruh harapan besar pada forum reses untuk memperoleh solusi atas kendala ekonomi yang makin mendesak. Berdasarkan hasil pengamatan, usulan yang muncul dari warga mencakup perbaikan jalan lingkungan yang rusak akibat aktivitas proyek, bantuan modal usaha, hingga pelatihan keterampilan UMKM agar produk lokal memiliki daya saing. Beberapa realisasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh warga antara lain pelatihan teknik pelabelan produk serta sekolah lapangan untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan dan pertanian. Aspirasi-aspirasi ini mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk menjadi subjek aktif dalam ekosistem ekonomi baru IKN, bukan sekadar menjadi penonton pembangunan dari pinggir jalan.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penyerapan aspirasi ini seringkali terbentur pada tembok birokrasi dan ketatnya verifikasi teknis yang mengakibatkan banyaknya usulan warga gugur di tahap administratif. Masalah utama yang sering dihadapi adalah ketidakmampuan kelompok masyarakat atau mitra pengabdian dalam menyusun proposal yang lengkap sesuai ketentuan teknis APBD, sementara waktu kunjungan reses yang terbatas membuat pendampingan belum optimal (Wafi dkk., 2025; Gazali dkk., 2025). Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara besarnya harapan warga dengan realitas program yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk memetakan capaian nyata serta tantangan sistemik yang menghambat pelaksanaan reses dalam memacu kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah pusat pertumbuhan nasional tersebut.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model observasi partisipatif (Ardiana, 2022). Kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendampingan pada forum penjangkaran aspirasi (reses) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Bapak Budi Sarwoto.

Tempat dan Waktu

Kegiatan reses dilaksanakan di kediaman Bapak Budi Sarwoto, yang berlokasi di Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku. Lokasi ini dipilih karena Desa Argomulyo merupakan salah satu desa terdampak langsung oleh pembangunan IKN di Penajam Paser Utara.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Argomulyo

Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan adalah warga Desa Argomulyo yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan kelompok tani. Peserta ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Sepaku.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan mencakup:

1. *Observasi Lapangan.* Mengamati dinamika interaksi antara anggota dewan dan warga (Hairani dkk., 2023).
2. *Wawancara Mendalam.* Menggali informasi mengenai kendala realisasi bantuan modal usaha dan infrastruktur.
3. *Studi Dokumentasi.* Menganalisis kesesuaian usulan warga dengan kriteria teknis APBD.

Indikator Keberhasilan dan Evaluasi

Indikator keberhasilan diukur dari teridentifikasinya permasalahan profil mitra dan rumusan solusi kebijakan. Evaluasi dilakukan melalui analisis terhadap jumlah aspirasi yang masuk dan kendala verifikasi yang dihadapi sekretariat DPRD (Gazali dkk., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Profil Mitra dan Permasalahan di Desa Argomulyo

Warga Desa Argomulyo saat ini menghadapi pergeseran *habitus* ekonomi dari agraris ke jasa dan konstruksi. Sejak Sepaku ditetapkan sebagai kawasan IKN, harga kebutuhan pokok melonjak tajam, menciptakan tekanan fiskal pada rumah tangga lokal (Diba dkk., 2025). Berdasarkan profil mitra, mayoritas pelaku usaha kecil mengeluhkan sulitnya mengakses bantuan modal karena persyaratan administratif yang rumit. Selain itu, peningkatan arus kendaraan proyek IKN mengakibatkan kerusakan jalan lingkungan di Argomulyo, yang menghambat distribusi produk pertanian warga.

Realisasi Program dan Manfaat bagi Masyarakat

Kegiatan reses yang dilaksanakan di kediaman Bapak Budi Sarwoto berhasil menghimpun berbagai aspirasi ekonomi strategis. Beberapa solusi yang telah terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi mitra meliputi:

1. *Infrastruktur*. Perbaikan jalan lingkungan dan drainase untuk mendukung mobilitas ekonomi warga.
2. *Peningkatan Skill UMKM*. Pelatihan pembuatan label produk yang menarik untuk meningkatkan daya saing di pasar IKN (Hairani dkk., 2023).
3. *Penguatan Sektor Pangan*. Penyelenggaraan sekolah lapangan pertanian untuk budidaya tanaman pangan dan manajemen ternak sapi serta kambing secara modern guna memenuhi kebutuhan pangan di kawasan IKN (Supriyanti dkk., 2023).

Tantangan Administratif dan Hambatan Fiskal

Meskipun terdapat keberhasilan, masih banyak usulan warga yang gagal di tahap verifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, dari empat aspirasi bantuan modal usaha yang diajukan pada tahun sebelumnya, terdapat usulan yang terkendala karena proposal tidak lengkap. Kemampuan teknis warga dalam menyusun proposal formal sesuai standar birokrasi masih menjadi hambatan utama (Wafi dkk., 2025).

Tabel 1. Hambatan Utama Pelaksanaan Reses di Sepaku

Kategori Hambatan	Temuan Lapangan di Sepaku	Referensi
Administrasi	Proposal sering tidak memenuhi standar teknis verifikasi APBD.	Wafi dkk. (2025)
Fiskal	Keterbatasan anggaran daerah akibat pengalihan fokus ke infrastruktur IKN.	Diba dkk. (2025)
Sosial	Lonjakan inflasi regional menurunkan daya beli warga asli.	Sutanto (2022)
Legalitas	Masalah legalitas lahan warga dalam pengajuan hibah infrastruktur.	Nurrachman (2024)

Kegiatan reses di Desa Argomulyo menunjukkan bahwa anggota dewan harus lebih fleksibel dalam mengatur skema bantuan mengingat standar hidup di Sepaku kini berbeda jauh dengan kondisi sebelum adanya IKN. Pendampingan sekretariat DPRD dalam verifikasi dokumen sangat krusial, namun sering terkendala waktu kunjungan yang singkat (Gazali dkk., 2025).

Kesimpulan

Kegiatan reses DPRD di Kecamatan Sepaku, khususnya di Desa Argomulyo, terbukti efektif sebagai wadah identifikasi masalah ekonomi warga. Manfaat nyata telah dirasakan melalui perbaikan jalan usaha tani dan pelatihan label UMKM. Namun, hambatan administratif berupa ketidaklengkapan proposal teknis warga tetap menjadi tantangan utama yang menggugurkan banyak usulan di tahap APBD. Kontribusi teoretis dari pengabdian ini menegaskan bahwa keberhasilan reses di wilayah terdampak megaprojek tidak hanya bergantung pada penyerapan suara, tetapi pada kualitas pendampingan administratif kepada mitra. Disarankan agar pemerintah daerah menyediakan unit pendampingan khusus bagi warga dalam menyusun proposal teknis agar aspirasi ekonomi mereka dapat terealisasi secara konkret.

Referensi

- Ardiana, R. (2022). Workshop “Penelitian Kualitatif” Sebagai Pembekalan Mahasiswa Semester Akhir untuk Menyelesaikan Skripsi. *JPKPM*, 2(1), 49-54.
- Diba, A. A. A., dkk. (2025). Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 28-33.
- Gazali, F. N., dkk. (2025). Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 375-388.
- Hairani, dkk. (2023). Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif dan Produktif pada Masyarakat Kalijaga Baru. *Valid Jurnal Pengabdian*, 1(3), 1-10.
- Nurrachman, A. (2024). Problematics of Developing the Indonesian Capital City on Traditional Land: Between State Interests and Protection of Indigenous Communities. *Journal Social Sciences and Humanioran Review (JSSHR)*, 1(6), 299-312.
- Rerung, R. C. G., & Sudiar, S. (2025). Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Keberlanjutan Program Pendanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 13(3), 689-700.
- Samosir, M. M., & Tukiman. (2024). Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan I Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 7(4), 2024-2043.
- Supriyanti, S. S., dkk. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar di Wilayah Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 49(1), 93-102.
- Sutanto, H. P. (2022). Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 43-56.

Wafi, A., dkk. (2025). Pendampingan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Situbondo Untuk Menampung Aspirasi Masyarakat. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 412-417.